

KAJIAN TEORI

1. Definisi Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang muara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Sedangkan kebijaksanaan selalu mengandung makna melanggar segala sesuatu yang pernah ditetapkan karena alasan tertentu.²⁰

Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran

²¹ Inu Kencana Syafie, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2012), 145.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang akan mengarahkan dan memengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut. Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan kebijakan tersebut.²³

2. Pengertian Kebijakan Publik

²² Amri Marzali, *Antropologi dan Kebijakan Publik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 19

²³ Ibid, 20.

²⁴ Miftah Thoha, *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 106.

apa yang pemerintah secara nyata lakukan, bukan sekedar pe-
sasaran tindakan yang diinginkan. Sasaran yang dimaksud
sasaran yang terarah atau bermaksud tindakannya diikuti o-
sejumlah aktor dalam upaya mengatasi masalah.²⁶

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat
Administrasi Publik. Menurut Chandler dan Plano meng-
kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terha-
sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah
pemerintah. Menurutnya kebijakan publik merupakan
investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan
yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat h-

Secara konseptual kebijakan publik dapat dilihat dari beberapa aspek, salah satunya adalah Administrasi Publik. Menurut Chandler dan Plano mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah masyarakat oleh pemerintah. Menurutnya kebijakan publik merupakan investasi yang kontinu oleh pemerintah demi kepentingan masyarakat yang tidak berdaya dalam masyarakat agar mereka dapat hidup dengan layak.

Menurut William N. Dunn, mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang tertentu yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertahanan keamanan.

s Madani, *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik* (Jakarta:Graha Ilmu, 2011), 18.

²⁶ Ibid, 19.

dilakukan". Dye mengatakan bahwa apabila pemerintah melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (obyektif) dan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat saja.²⁷

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan publik. Kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan publik.

Jadi, dealnya suatu kebijakan publik adalah kebijakan

Definisi kebijakan publik diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan kebijakan publik harus berorientasi kepada kepentingan kebijakan publik adalah tindakan pemilihan alternatif untuk atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah demi kepentingan p

Jadi, dealnya suatu kebijakan publik adalah keb

Jadi, dealnya suatu kebijakan publik adalah keb

3. Jenis-jenis Kebijakan Publik

Jenis- jenis kebijakan publik dapat ditelusuri melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 menjelaskan jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Peraturan, Pemerintahan Pengganti Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah

4. Proses Kebijakan

Kebijakan publik sebagaimana telah digambarkan, tidak begitu saja lahir, namun melalui proses atau tahapan yang cukup panjang. Menurut Thomas R. Dye proses kebijakan publik meliputi beberapa hal berikut.²⁸

1. Identifikasi masalah kebijakan.

²⁸ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 16-17.

pada pejabat publik dan media masa atas keputusan a
diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

3. Perumusan kebijakan

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumsu
melalui insiasi dan penyusunan usulan kebij
organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan
pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

4. Pengesahan kebijakan

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh
kelompok penekan, presiden, dan kongres.

5. Implementasi Kebijakan

Penyusunan agenda merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.

Perumusan merupakan tahapan pengusulan rumsuan kebijakan melalui insiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.

Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres.

Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi anggaran publik, dan aktivitas agen eksekutif yang organisasi.

Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan diluar pemerintah, pers, dan masyarakat.

Apabila suatu kebijakan sudah mendapatkan dukungan publik dan telah disusun dalam bentuk program panduan rencana kegiatan. Kebijakan tersebut harus dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun oleh unit kerja pemerintah ditingkat bawah. Setelah kebijakan dilaksanakan perlu adanya penilaian untuk melihat sampai sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Menurut Grow dan Morss mengungkapkan berbagai hambatan dalam implementasi kebijakan, yakni;

- 28

Menurut Hinggis, implementasi sebagai rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.

Dari beberapa definisi implementasi diatas, peneliti memilih definisi Van Meter dan Van Horn karena dalam definisinya lebih kepada tindakan yang dilakukan baik individu, atau kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan dalam keputusan kebijakan.

[illegible]

Tiga Kegiatan tersebut adalah:³³

a. Organisasi

Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

b. Interpretasi

Menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

c. Penerapan

Ketentuan rutin pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

2. Model Implementasi

Menurut Charles O. Jones kebijakan publik merupakan kebijakan yang digunakan dalam praktek sehari-hari. Namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Charles Jones menganalisis masalah implementasi kebijakan dengan cara yang skematis, dengan mendasarkan pada konsep aktivitas-aktivitas fungsional.

Mengemukan beberapa dimensi dari pelaksanaan pemerintah mengenai program-program yang disahkan, kemudian menentukan

³³ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 296.

- a. Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan ke-
daya, unit-unit metode untuk menjadikan progr
(restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan
pelaksanaan program).
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
(merancang program kedalam rencana dan tindakan
diterima dan dilaksanakan).
- c. Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran
yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
(dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program

- a. Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan ke-
daya, unit-unit metode untuk menjadikan progr
(restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan
pelaksanaan program).
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
(merancang program kedalam rencana dan tindakan
diterima dan dilaksanakan).
- c. Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran
yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
(dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program

- a. Organisasi, merupakan pembentukan atau penataan ke-
daya, unit-unit metode untuk menjadikan progr
(restrukturisasi sumber daya, pembentukan unit, dan
pelaksanaan program).
- b. Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi
pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta
(merancang program kedalam rencana dan tindakan
diterima dan dilaksanakan).
- c. Penerapan, kebutuhan rutin dari pelayanan pembayaran
yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan
(dukungan pendanaan dan lain-lain sesuai tujuan program

³⁴ Charles O. Jones, *Pengantar Kebi*